

# **PENGELOLAAN PASAR TERNAK SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI MUARO PANEH KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK**

*Tesis (S2) oleh : Yuli Hidayati*

*Pembimbing I: Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum Pembimbing II: Dr. Suharizal SH, MH*

## **ABSTRAK**

Pasar ternak merupakan salah satu bentuk pasar nagari yang berkedudukan sebagai harta kekayaan nagari. Keberadaan pasar nagari erat kaitannya dengan keberadaan dari nagari itu sendiri. Pengelolaan pasar nagari harus dilakukan oleh pemerintahan nagari dengan tetap mengakui keberadaan masyarakat Hukum adat. Pengaturan pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari dilakukan oleh pemerintahan nagari berdasarkan peraturan nagari. Pemerintahan nagari yang merupakan pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pasar nagari, karena pasar nagari merupakan bagian daripada harta kekayaan nagari yang dimiliki oleh nagari. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah proses pembentukan pengurus pasar ternak sebagai pasar nagari di Muaro Paneh? (2) Bagaimanakah proses pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di Muaro Paneh Kabupaten Solok? (3) Bagaimanakah hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian pelaksanaan hukum dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Proses pembentukan pengurus pasar ternak pada pasar Nagari Muaro Paneh berdasarkan hasil musyawarah ninik mamak anggota KAN. Di sini terlihat KAN memiliki peran yang sangat penting sementara pemerintah nagari tidak dilibatkan dalam proses pembentukan pengurus pasar. (2) Pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di Muaro Paneh Kabupaten Solok setelah berakhirnya pemerintahan desa dan kembali ke pemerintahan nagari masih tetap di kelola oleh KAN, terdiri dari perencanaan yang dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelola pasar, pemanfaatan pasar Nagari Muaro Paneh juga dirasakan oleh pihak ketiga yaitu masyarakat di luar Nagari Muaro Paneh, pengawasan pasar Nagari dilakukan oleh KAN dan badan komisi terhadap badan pengelola. (3) Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan Nagari di Muaro Paneh adalah mengatur retribusi pasar grosir ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat ternak untuk ternak yang berasal dari luar daerah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di nagari Muaro Paneh tidak sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Pasar Tradisional atau Pasar Nagari di Kabupaten Solok.

Kata kunci: Pengelolaan, Pasar Ternak dan kekayaan nagari

# LIVESTOCK MARKET AS PROPERTY MANAGEMENT VILLAGE OF MUARO PANEH DISTRICT SOLOK

*Tesis (S2) oleh : Yuli Hidayati*

*Pembimbing I: Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum Pembimbing II: Dr. Suharizal SH, MH*

## ABSTRACT

Livestock market which is considered as village wealth is one form of the market-based village. The existence of village market is closely related to the existence of the village itself. Village market management should be managed by the village government and the management also should consider the existence of customary law communities. The settings of market management as the village wealth which is regulated in West Sumatra Provincial Regulation No. 2 of 2007 on Principles of village administration, management, and utilization of the village wealth is managed by village government under the rules of the village. Village government which is the lowest government in Indonesia has the authority and responsibility to manage the village market because the village market is part of the village wealth owned by the village. This study focused on three (3) issues, namely: (1) How is the process of forming the board of livestock market as the village market in Muaro Paneh? (2) How is the process of managing the livestock market as the village wealth in Muaro Paneh Solok District? (3) How is the relationship between the local government and village government in managing of livestock market as a village wealth of Muaro Paneh Solok district?. This study used a juridical empirical method which is a law enforcement in managing the livestock market as village wealth in Muaro Paneh Solok District. The Key data used in this study is primary data collected by using interviews while the Secondary data were obtained using document study as supporting data. This is a descriptive study. The results show: (1) The process of forming the livestock market's management in village market Muaro Paneh is based on the consensus reached by *Ninik Mamak* as *KAN* members. It can be said that *KAN* has a very important role, meanwhile the village government is not involved in the process of forming the market board. (2) The Management of livestock market as village wealth in Muara Paneh Solok district, after the end of village government and back to the village government, is still managed by *KAN*. The management consists of, first, the planning done by the commission board and market management board. Second, The utilization of village market Muaro Paneh is also perceived by a third party, the people that live outside Muaro Paneh. Third, The supervision is done by *KAN* and commission board to management board. (3) The relationship between local government and village government in managing the livestock market as a village wealth in Muaro Paneh is to organize the livestock market retribution and to issue a letter certificate for the cattle originating from outside the area. It can be concluded that the management of the livestock market as village wealth in Muaro Paneh is not in accordance with the Regulation of West Sumatra Province No. 2 of 2007 on Principles of Village administration and the decree No. 46 of 2009 on Guidelines and Management of Traditional Market or village market in the Solok district.

Keywords: Management, Livestock markets, and village wealth.